

Jurnal Of Development Economic and Digitalization

Vol. 3, No. 1, 2024, pp. 87-108
P-ISSN 2963-6221 – E-ISSN 2962-8520

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Devi Yuliana Putri^{1*}, Renea Shinta Aminda²

¹deviyulianap@gmail.com, ²renea.shinta.rsa@gmail.com

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, ²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*Penulis Korespondensi

Received: 8 Februari 2024

Published: 29 Februari 2024

Abstrak

Provinsi D.I Yogyakarta termasuk wilayah yang kaya akan potensi pariwisata dan pendidikan serta menjadi salah satu wilayah pusat pertumbuhan ekonomi, namun masih terjadi permasalahan ketimpangan pendapatan yang mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis adanya pengaruh antara pengeluaran per kapita, inflasi, upah minimum, dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta. Pada penelitian ini sampel digunakan teknik *non-probability* sampling yang menggunakan jenis *purposive sampling* di Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2010-2022. Sehingga jumlah sampel 65 data yang didapatkan melalui Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta. Analisis data panel digunakan pada penelitian ini yang merupakan gabungan data *time series* dan *cross section* dengan model terbaik menggunakan *Common Effect Model* (CEM). Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pengeluaran per kapita berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta, inflasi memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta, upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta, dan Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta. Hasil penelitian secara simultan memperlihatkan bahwa pengeluaran per kapita, inflasi, upah minimum, dan RLS berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta.

Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan, Pengeluaran Per Kapita, Inflasi, Upah Minimum, Rata-Rata Lama Sekolah

Abstract

D.I Yogyakarta Province is an area that is rich in tourism and education potential and is one of the central areas of economic growth, however there is still the problem of income inequality which may be influenced by several factors. This research aims to analyze the influence of per capita expenditure, inflation, minimum wage, and Average Years of Schooling (RLS) on income inequality in the District/City of D.I Yogyakarta Province. In this study, the sample used a non-probability sampling technique using purposive sampling in the District/City of D.I. Yogyakarta Province in 2010-2022. So the total sample is 65 data obtained through the D.I Yogyakarta Provincial Central Statistics Agency. Panel data analysis is used in this research, which is a combination of time series and cross section data with the best model using the Common Effect Model (CEM). The findings of this research reveal that per capita expenditure has an insignificant negative effect on income inequality in D.I Yogyakarta Province, inflation has an insignificant negative effect on income inequality in D.I Yogyakarta Province, the minimum wage has a significant positive effect on income inequality in D.I Yogyakarta Province, and the average Average Years of Schooling has a significant positive effect on income inequality in D.I Yogyakarta Province. The research results simultaneously show that per capita expenditure, inflation, minimum wage, and RLS have a significant effect on income inequality in D.I. Yogyakarta Province.

Keywords : *Income Inequality, Per Capita Expenditure, Inflation, Minimum Wage, Mean Years of Schooling*

1. PENDAHULUAN

Kemakmuran perkonomian memegang kunci dalam pembangunan ekonomi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia (Nurain & Juliannisa, 2022). Pada dasarnya, pembangunan bertujuan untuk mengatasi permasalahan dan menciptakan pembangunan di suatu negara (Rahman & Putri, 2021). Penciptaan kesejahteraan memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan meratanya distribusi pendapatan (Hariani, 2019).

Sebagai negara dengan ribuan pulau, keberagaman karakteristik wilayah merupakan risiko yang tidak mampu dihindarkan oleh Indonesia. Karakteristik wilayah berdampak besar terhadap penciptaan struktur perkembangan ekonomi. Sudah menjadi hal yang wajar jika pola perkembangan ekonomi di Indonesia berbeda. Adanya keberagaman tersebut berdampak terhadap keinginan untuk berkembang yang pada akhirnya menyebabkan beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang pesat, namun wilayah lainnya mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan. Keinginan untuk berkembang tersebut selanjutnya mengakibatkan timbulnya ketimpangan terhadap pembangunan dan pendapatan antar daerah (Saraswati, 2020).

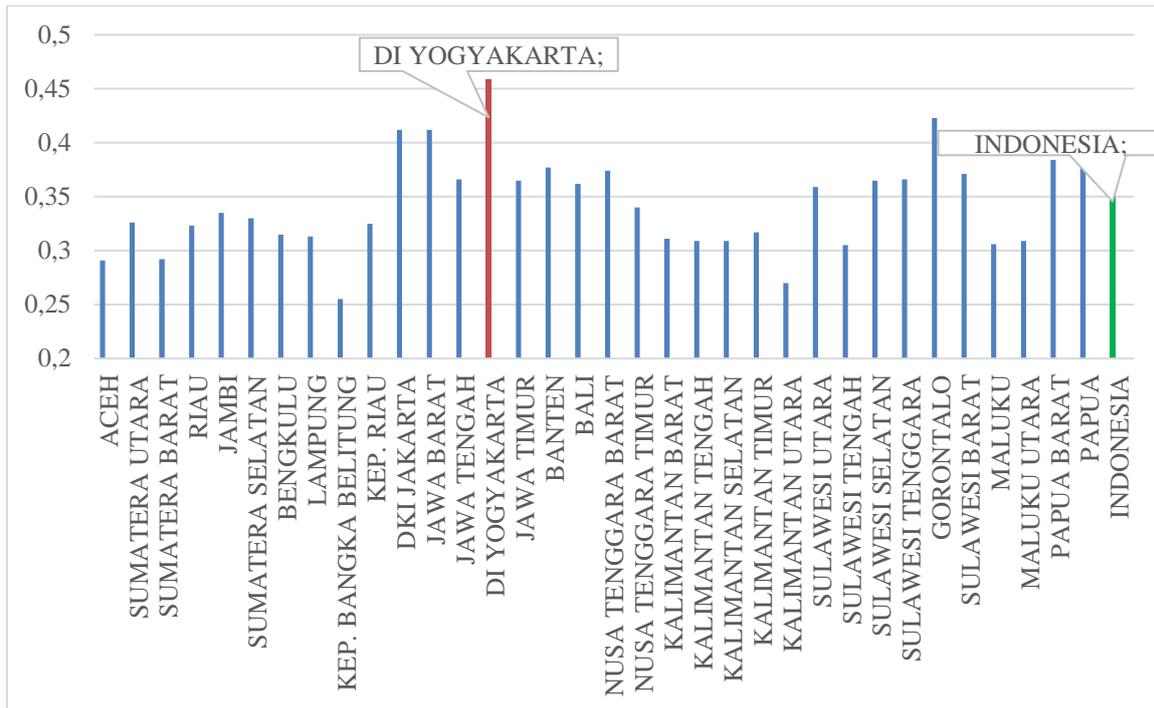
Secara umum, negara berkembang seperti Indonesia mengalami dua permasalahan besar yaitu kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Ketimpangan pendapatan disebabkan karena tidak meratanya distribusi pendapatan yang diterima masyarakat (Rachmawatie, 2021). Terdapat kesenjangan pendapatan penduduk berpenghasilan tinggi dan penduduk berpenghasilan rendah, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan (Shinetiara & Roza, 2023).

Berdasarkan teori Kuznets oleh (Kuznets, 1995) memperlihatkan bahwa naiknya ketimpangan pendapatan memiliki kaitan erat terhadap kenaikan pendapatan perkapita sebelum mencapai ambang batas tertentu. Selanjutnya, setelah melewati ambang batas tersebut, terjadi penurunan ketimpangan pendapatan dan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang membentuk pola pertumbuhan ekonomi berbentuk huruf "U" terbalik. Aspek sosial, ekonomi, dan politik menjadi elemen penting yang dapat berpengaruh terhadap pola tersebut, dimana terjadi akumulasi modal di kalangan pendapatan tinggi dan bergesernya penduduk yang mulanya di sektor pertanian tradisional ke sektor industri modern (Shinetiara & Roza, 2023).

Kuznets menyebutkan ketika awal pembangunan ekonomi, tumbuhnya perekonomian yang signifikan cenderung menimbulkan peningkatan ketimpangan pendapatan. Tetapi, secara berkepanjangan perekonomian akan menggapai titik kedewasaan, naiknya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan ketimpangan pendapatan menurun (Rahmah Muthia, 2018).

Ketimpangan pendapatan di Indonesia sampai saat ini terus menjadi suatu permasalahan dan memiliki tingkat ketimpangan yang berbeda pada setiap wilayahnya. Salah satu metode yang digunakan dalam pengukuran pemerataan distribusi pendapatan adalah Gini Rasio. Menurut Badan Pusat Statistik, Gini Rasio memiliki nilai dari 0 hingga 1. Gini Rasio kecil memiliki nilai dibawah 0,4 yang menandakan bahwa ketimpangan rendah, kemudian angka 0,4 – 0,5 menandakan bahwa ketimpangan tersebut tergolong ketimpangan sedang dan angka diatas 0,5 menandakan bahwa ketimpangan tersebut tergolong ketimpangan tinggi. Nilai Gini Rasio yang semakin mendekati 1 menandakan bahwa semakin tingginya tingkat ketimpangan, sehingga diperlukan usaha agar Gini Rasio mendekati angka 0 untuk menandakan bahwa distribusi pendapatan sudah merata (S. Dai et al., 2023).

Gambar 1. Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2022



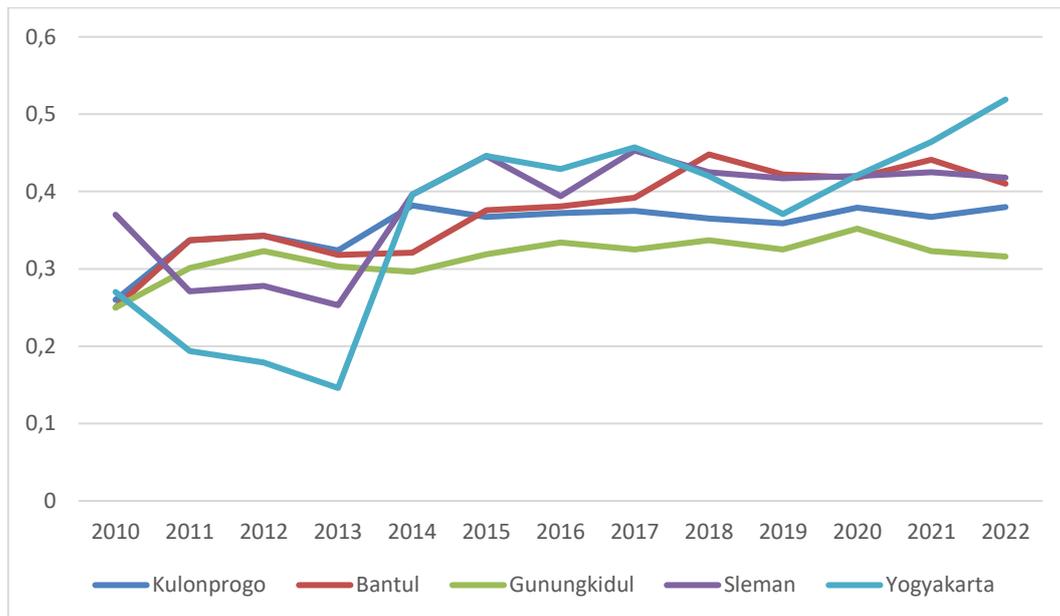
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tahun 2022, ketimpangan pendapatan Indonesia berada pada tingkat ketimpangan rendah dikarenakan angka Gini Rasio berada di bawah 0,4. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beragam budaya, struktur sosial, dan perekonomian. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban dalam memajukan daerahnya sendiri (Muharam, 2022). Wilayah dengan ketimpangan tertinggi ke-1 di Indonesia terjadi pada Provinsi D.I Yogyakarta.

Ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2022 berada pada posisi paling tinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Provinsi D.I Yogyakarta memiliki Gini Rasio 0,459 atau berada pada peringkat pertama sebagai provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi. Posisi yang sangat tinggilah tentu menjadi sebuah pertanyaan mengapa daerah yang kaya akan potensi pariwisata dan pendidikan justru menjadi provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia (Prabowo, 2022).

Artinya meskipun Provinsi D.I Yogyakarta menjadi wilayah pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintah, tidak menutup kemungkinan provinsi ini tidak mempunyai masalah perekonomian seperti ketimpangan pendapatan. Tingkat Gini Rasio Provinsi D.I Yogyakarta dari tahun 2016 – 2022 selalu berada pada angka lebih dari 0,4 atau melebihi Gini Rasio Nasional sebesar 0,381 dan selalu menjadi peringkat pertama sebagai provinsi dengan ketimpangan tertinggi di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023).

Gambar 2. Gini Rasio Provinsi D.I Yogyakarta Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gini Rasio di Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta dihadapkan penurunan maupun peningkatan berbeda pada setiap tahunnya. Rata-rata ketimpangan di Provinsi D.I Yogyakarta berada pada ketimpangan pendapatan rendah sampai sedang. Pada tahun 2022, ketimpangan tertinggi terjadi pada Kota Yogyakarta dengan angka 0,519 yang menunjukkan bahwa tingginya ketimpangan pendapatan mampu menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Nabila & Laut, 2021). Adanya ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan perbedaan sisi kemajuan ekonomi dan perbedaan keterbatasan di setiap wilayah serta terfokusnya pengembangan wilayah yang sudah cukup baik, misalnya pada Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta (Kusuma et al., 2019).

Menurut Didik Junaedi Rachbini selaku Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S), ketimpangan ekonomi di Yogyakarta disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi pada bidang pendidikan dan pariwisata yang sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun terakhir. Pesatnya pertumbuhan tersebut memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan bagi kaum menengah dan atas, tetapi bagi kaum menengah bawah belum menerima dampak dari pertumbuhan ekonomi tersebut (Alfadhillah et al., 2023).

Menurut Asian Development Bank (2012), ketimpangan pendapatan yang secara umum menggunakan ukuran Gini Rasio, dapat diukur melalui pendekatan pendapatan maupun pendekatan pengeluaran (Dewi et al., 2022). Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan bahwa pengeluaran per kapita dihitung berdasarkan konsumsi anggota rumah tangga dalam satu bulan. Konsumsi rumah tangga perlu diperhatikan dalam analisis makroekonomi, karena konsumsi rumah tangga turut berperan dalam meningkatkan pendapatan nasional. Pengeluaran konsumsi di sebagian besar negara berkisar 60 sampai 75% dari pendapatan nasional.

Konsumsi rumah tangga dapat berpengaruh terhadap penentuan fluktuasi kegiatan ekonomi pada suatu periode ke periode lainnya (Huda & Indahsari, 2021). Penghasilan seseorang menjadi salah satu faktor memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan konsumsi karena konsumsi seseorang akan sejalan dengan pendapatannya. (Akrom, 2020). PDRB per kapita mengacu pada pertumbuhan output per kapita yaitu ketika output per kapita

terjadi peningkatan, maka pola konsumsi akan mengalami perubahan. Perubahan pola konsumsi pada masyarakat menandakan adanya peningkatan daya beli masyarakat (Huda & Indahsari, 2021).

Pada jangka panjang, pembangunan manusia berpengaruh terhadap naiknya pendapatan per kapita masyarakat yang dibarengi dengan peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat. Menurut Patriotika dalam penelitian (Duarsa & Wijaya, 2023) menyatakan pengeluaran per kapita dapat digunakan sebagai indikator dalam pengukuran standar hidup manusia dan tingkat daya beli masyarakat yang memiliki hubungan dengan tercapainya kesejahteraan sebuah negara. Pengeluaran per kapita masyarakat dapat menggambarkan tingkat daya beli atau PPP (Purchasing Power Parity) yang menjadi indikator untuk melihat pembangunan manusia di suatu wilayah.

Ahluwalia dalam penelitian (Nadya & Syafri, 2019) menyebutkan bahwa proses pendidikan yang memberikan dampak terhadap distribusi pendapatan adalah berupaya mengembangkan wawasan dan keahlian dalam bekerja, sehingga mampu menyebabkan pekerja dengan gaji rendah dan pekerja tidak terampil dapat bergaji tinggi yang terampil. Bergesernya hal tersebut dapat menyebabkan pendapatan akan semakin tinggi.

Telah menjadi rahasia umum bahwa bekerja menjadi sumber utama dalam menerima suatu pendapatan serta status dalam pekerjaan dapat menentukan tingkat upah seseorang. Ketika pendidikan yang telah diselesaikan seseorang semakin tinggi akan berdampak terhadap status pekerjaan yang akan diterima akan semakin tinggi pula.

Dengan fenomena di atas menjadi dasar peneliti melangsungkan penelitian dengan topik ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta, dimana sejak awal 2010 hingga 2022 memperlihatkan distribusi pendapatan yang belum merata sempurna. Sesuai dengan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian mengenai ada atau tidak adanya pengaruh dari pengeluaran per kapita, inflasi, upah minimum, dan rata-rata lama sekolah terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta serta dapat menjadi acuan bagi pemerintahan daerah untuk memperhatikan faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Ketimpangan Pendapatan Simon Kuznets

Kuznets menyampaikan bahwa pada awal proses pembangunan, distribusi pendapatan cenderung tidak merata. Selanjutnya ketika tercapainya tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan kemudian menjadi lebih merata. Terdapat implikasi bahwa pada jangka pendek, terjadi hubungan positif pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, berarti pertumbuhan ekonomi menyebabkan kenaikan ketimpangan pendapatan. Meski demikian, pada jangka panjang hubungan tersebut berubah menjadi negatif, mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan mampu menurunkan ketimpangan pendapatan.

Perbincangan tentang korelasi antara ketidakmerataan dan pertumbuhan ekonomi awal mula oleh ekonom Simon Kuznets memperkenalkan konsep hipotesis U terbalik (Alin et al., 2019). Perubahan pada jangka panjang dalam teknologi, geografi, dan sosial turut berubah sebagai upaya mempengaruhi ekonomi disebut dengan proses pertumbuhan ekonomi (Kuznets, 1955). Simon Kuznets menyatakan suatu konsep tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu daerah berdasarkan tiga aspek yaitu semakin naiknya output nasional, perkembangan teknologi yang bergantung pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan dan penyesuaian kelembagaan.

Pada penelitian Simon Kuznets (Todaro, 2006), ciri pertumbuhan ekonomi modern salah satunya besarnya pertumbuhan output perkapita. PDRB perkapita mengacu pada pertumbuhan output perkapita, ketika output perkapita naik dapat menyebabkan bergesernya pola konsumsi. Pergeseran pola konsumsi masyarakat menandakan terjadinya kenaikan daya beli masyarakat (Huda & Indahsari, 2021).

Apabila ditinjau pada sisi pendidikan, kenaikan sektor modern menuntut keterampilan yang selanjutnya menimbulkan pasokan kerja yang terdidik mengalami kenaikan dan tenaga kerja tidak terampil mengalami penurunan. Hal ini berarti terjadi *trade off* atau pilihan antara distribusi pendapatan dan pertumbuhan PDRB (Todaro & Smith, 2011).

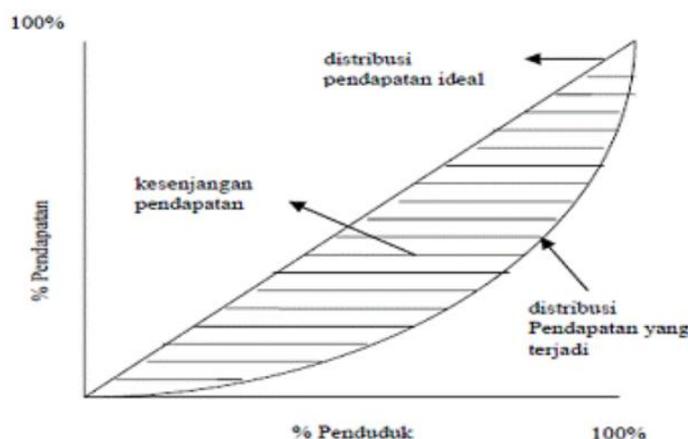
Definisi Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan pernyataan Todaro dan Smith (2011), ketimpangan pendapatan merupakan ketidakseimbangan distribusi dari pendapatan nasional total di antara beberapa rumah tangga (Pranita & Idris, 2021). Pada teori Karl Mark (1787) mengemukakan pertumbuhan ekonomi di masa awal pembangunan dapat berpengaruh terhadap kenaikan tenaga kerja. Kenaikan penghasilan tenaga kerja dapat berdampak pada peningkatan risiko kapital pada tenaga kerja yang pada akhirnya mampu memperkecil permintaan tenaga kerja. Hal ini menimbulkan adanya permasalahan pengangguran dan semakin tingginya ketimpangan pendapatan (Romi, 2021).

Menurut teori Neo-Klasik dalam awal pembangunan negara, ketimpangan pembangunan antara berbagai daerah memiliki kecenderungan naik. Ketimpangan terus bertambah hingga mencapai puncaknya. Namun, jika pembangunan terus berlanjut, seiring berjalannya waktu ketimpangan pembangunan antar wilayah akan turun (Andina et al., 2019).

Secara umum, kurva Lorenz sering dipakai sebagai alat untuk mengilustrasikan ketimpangan dalam distribusi pendapatan masyarakat. Kurva Lorenz adalah kurva distribusi variabel tertentu dibandingkan dengan distribusi serupa yang mewakili persentase kumulatif populasi untuk membuat kurva Lorenz, yang merupakan kurva pengeluaran kumulatif (Hartati, 2022).

Gambar 7. Kurva Lorenz



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dalam gambar yang disajikan di atas, terlihat bahwa semakin mendekati diagonal, tingkat ketimpangan menjadi lebih rendah. Sedangkan apabila kurva semakin menjauh dari

diagonal, maka ketimpangan akan semakin besar. *rasio* merupakan salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. BPS melakukan pengukuran besarnya ketimpangan di Indonesia melalui nilai pengeluaran yang menjadi proksi pendapatan dan berasal dari Susenas.

Gini Rasio mempunyai nilai 0 (nol) sampai 1 (satu). Ketika angka Gini Rasio mendekati 0 (nol), ini mengindikasikan pendapatan didistribusikan secara merata, atau masyarakat dalam daerah tersebut memiliki pendapatan yang hampir sama jumlahnya. Sebaliknya, ketika Gini Rasio mendekati angka 1 (satu) menandakan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan, atau masyarakat dalam daerah tersebut memiliki pendapatan yang tidak merata. (Sholikah & Imaningsih, 2022).

Berikut perhitungan Gini Rasio:

$$GR = 1 - \sum f_i (Y_i + Y_{i-1})$$

GR = Gini Rasio

f_i = Total kumulatif penerima pendapatan pada kelompok ke- i

Y_i = Total kumulatif penerima pendapatan pada kelompok ke- i

Y_{i-1} = Total kumulatif pendapatan pada kelompok ke- i

Pengeluaran Per Kapita

Teori konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes dianggap sebagai pencapaian dalam bidang empiris pada masanya. Keynes berpendapat bahwa ketika seseorang menerima tambahan pendapatan, secara alami mereka akan meningkatkan konsumsinya, meskipun besarnya peningkatan konsumsi ini tidak akan sebanding dengan besarnya tambahan pendapatan tersebut. Peningkatan pendapatan ini bergantung pada *Marginal Propensity to Consume* (MPC) yaitu merupakan persentase dari pendapatan yang akan dipakai untuk konsumsi, dengan nilai MPC berkisar antara 0 hingga 1. Kesimpulannya, ketika pendapatan meningkat, kemungkinan besar akan terjadi peningkatan dalam jumlah konsumsi (Nizar & Arif, 2023).

Perhitungan pengeluaran per kapita dapat dilakukan melalui cara berikut:

$$PKP = \frac{\text{Biaya pengeluaran konsumsi semua anggota rumah tangga}}{\text{Banyaknya anggota rumah tangga}}$$

Pengeluaran per kapita secara keseluruhan berlandaskan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang ditujukan bagi barang dan jasa sesuai kebutuhan harian oleh rumah tangga pada kurun waktu tertentu. Pengeluaran per kapita adalah ukuran yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik dalam menunjukkan dimensi standar hidup layak yang menjadi bagian dari Indeks Pembangunan Manusia. Standar hidup layak sendiri merupakan aspek dari kualitas hidup manusia dengan gambaran secara luas menunjukkan kesejahteraan yang akan diperoleh penduduk sebagai efek dari semakin stabilnya ekonomi di suatu wilayah (Halim, 2012).

Inflasi

Menurut teori Keynes menyatakan bahwa keberadaan inflasi dapat disebabkan oleh sikap masyarakat dengan keinginan hidup melebihi batas kemampuan penghasilan sehingga permintaan masyarakat untuk barang melampaui dari yang tersedia. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya inflasi yang dibarengi dengan keberadaan redistribusi penghasilan (Rizkianda, 2022). Berikut dapat dilihat perhitungan inflasi :

$$\text{Inflasi} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$$

IHK_t = Indeks Harga Konsumen tahun sekarang

IHK_{t-1} = Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya

Menurut teori Keynes dalam konteks makroekonomi, terdapat inflasi dikarenakan masyarakat menginginkan untuk menjalani gaya hidup yang melebihi kemampuan ekonomi mereka. Dalam pandangan ini, inflasi muncul sebagai akibat dari persaingan untuk menerima bagian yang lebih banyak dari yang tersedia dalam masyarakat tersebut. Hasilnya, persaingan tersebut mengakibatkan permintaan masyarakat terhadap barang-barang lebih tinggi dari total barang yang ada, dan ini menghasilkan apa yang disebut sebagai *inflationary gap* (Rando et al., 2021).

Upah Minimum

Upah minimum merupakan jumlah penghasilan bulanan paling rendah yang diperoleh para pekerja dari pemberi kerja atau pengusaha sebagai wujud pemberian imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilaksanakan. Besaran upah minimum ini telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dibayarkan menyesuaikan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dijadikan acuan pada penetapan upah minimum melalui peninjauan produktifitas dan perkembangan ekonomi (Dongoran et al., 2023). Perhitungan upah minimum dapat dilakukan :

$$UM(t+1) = UM(t) + (\text{penyesuaian nilai } UM \times UM(t))$$

$UM(t+1)$ = Upah minimum yang hendak ditentukan

$UM(t)$ = Upah minimum tahun berlangsung

Penyesuaian nilai $UM \times UM(t)$ = Penyesuaian upah minimum yang diperoleh dari hasil jumlah inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan alpha.

Penetapan upah minimum di Indonesia telah hadir sejak akhir tahun 1980-an atau sejak pertengahan tahun 1990-an. Penetapan mengenai upah minimum di Indonesia terus meningkat dikarenakan adanya tekanan dari dalam negeri maupun dunia internasional (Ahmaddien & Sa'dia, 2020). Pemerintah membuat penetapan upah minimum dengan tujuan mendukung pekerja dan buruh dari eksploitasi selama bekerja dan memastikan bahwa mereka menerima gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Penetapan upah juga bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan dalam memastikan bahwa standar hidup layak terpenuhi (Paramita, 2021).

Rata-Rata Lama Sekolah

Pendidikan menjadi elemen penting pada modal manusia dan dipandang dapat menentukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Todaro dan Smith mengemukakan mengenai pendidikan sebagai tujuan pembangunan yang mendasar, dimana pendidikan berperan sangat penting dalam pembentukan keahlian suatu negara sebagai upaya penyerapan teknologi modern dan sebagai pengembangan kapasitas demi terwujudnya pertumbuhan serta pengembangan berkelanjutan (Lestari, 2021). Rumus rata-rata lama sekolah dapat dilakukan dengan :

$$RLS = \frac{1}{N} \times \sum_{i=1}^n Xi$$

RLS = Rata-Rata Lama Sekolah

X_i = Lama sekolah penduduk ke- i umur 25 tahun

N = Jumlah penduduk umur 25 tahun ke atas

Berdasarkan teori *human capital* dari Gary S. Becker menyatakan bahwa tingginya pendidikan seseorang dapat menyebabkan seseorang tersebut akan memperoleh pekerjaan dan upah yang lebih besar (Nurain & Juliannisa, 2022).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan elemen yang diteliti dalam penelitian meliputi Ketimpangan Pendapatan, Pengeluaran Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, dan Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia. Penggunaan sampel berupa data panel dilakukan pada penelitian ini, data *time series* dari tahun 2010 – 2022 dan data *cross section* merupakan 5 Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta dengan keseluruhan total observasi adalah 65 data.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini berasal dari data sekunder, didapat secara tidak langsung dan sudah ada serta telah dipublikasikan oleh pihak yang bersangkutan dan digunakan sebagai objek dalam penelitian. Data penelitian didapat dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik, jurnal ilmiah, dan literatur terkait dengan topik yang diteliti. Seluruh data memiliki sifat kuantitatif dan berupa angka-angka yang diperoleh melalui perhitungan yang diolah dengan menggunakan kriteria statistik tertentu. Data ini mencakup Ketimpangan Pendapatan, Pengeluaran Per Kapita, Inflasi, Upah Minimum, dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta dari tahun 2010 hingga 2022. Data pada penelitian didapatkan dari BPS Indonesia, termasuk data mengenai Ketimpangan Pendapatan, Pengeluaran Per Kapita, Inflasi, Upah Minimum, dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2010 hingga 2022. Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dilaksanakan melalui pembuatan salinan pada Ketimpangan Pendapatan, Pengeluaran Per Kapita, Inflasi, Upah Minimum, dan Rata-Rata Lama Sekolah dari tahun 2010 - 2022 ke dalam microsoft Excel 2021 untuk diolah dengan mudah didalam program *software E-Views 12*.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini memakai metode regresi data panel yakni berupa kombinasi data *time series* dan data *cross section*. Data *time series* dimanfaatkan sejumlah 13 tahun, yakni mulai tahun 2010 hingga 2022. Sementara itu, data *cross section* berfokus pada 5 Kabupaten/Kota yang terletak di Provinsi D.I Yogyakarta. Persamaan regresi linier berganda data panel yang digunakan dapat dilihat sebagai berikut (Ghozali & Ratmono, 2017):

$$GR_{it} = \beta_0 + \beta_1 PKP_{1it} + \beta_2 IF2_{it} + \beta_3 UM3_{it} + \beta_4 RLS4_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

GR = Ketimpangan Pendapatan (Rasio)

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien garis regresi

PKP = Pengeluaran Per Kapita (Rupiah)

IF	= Inflasi (Persen)
UM	= Upah minimum (Rupiah)
RLS	= Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
i	= <i>Cross Section</i>
t	= <i>Time Series</i>
ε	= <i>Error</i> /variabel pengganggu

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas berguna agar mendeteksi error yang terdapat di data penelitian dan model regresi data mampu berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Ketentuan data terdistribusi normal ketika p value > alpha (0,05), sementara ketika nilai p value < alpha (0,05) menandakan data tidak berdistribusi normal. Hasil olah data uji normalitas yaitu:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

<i>Probability</i>	0.091039
--------------------	----------

Sumber: Hasil olah data

Dilihat pada tabel 8, nilai probability sebesar 0,091039 lebih besar dari alpha (0,05), menandakan data penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berguna agar mendeteksi terdapat atau tidaknya hubungan atau korelasi pada setiap variabel bebas yang digunakan dan seberapa besar hubungannya. Uji ini dilakukan dengan melihat korelasi penelitian dimana ketika nilai korelasi lebih besar dari 0,9 menandakan terindikasinya masalah multikolinearitas (Gozali, 2018). Berikut hasil olah data uji multikolinearitas dengan nilai korelasi:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas Menggunakan Nilai Korelasi

	LNP KP	INF	LNUM	RLS
LN				
PK	1.0000	0.0821	0.3469	0.8581
P	00	50	39	24
IN	0.0821	1.0000	0.29787	0.0175
F	50	00	1	87
LN				
U	0.3469	0.29787	1.0000	0.3509
M	39	1	00	74
RL	0.8581	0.0175	0.3509	1.0000
S	24	87	74	00

Sumber: Hasil olah data

Dilihat dari tabel 9, menggunakan nilai korelasi data dinyatakan telah terbebas dari masalah multikolinearitas karena setiap variabel nilainya tidak melebihi 0,9.

Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah mendeteksi model regresi mempunyai korelasi pada kesalahan periode sekarang dan periode t-1 (sebelumnya) menggunakan metode *Durbin-Watson*. Berikut kriteria penelitiannya:

- Ketika nilai *Durbin-Watson* < 2 , menunjukkan keberadaan autokorelasi positif.
- Ketika nilai *Durbin-Watson* antara -2 hingga 2, menandakan bahwa tidak ada masalah autokorelasi.
- Ketika nilai *Durbin-Watson* > 2 , menandakan keberadaan autokorelasi negatif.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	1.120090
--------------------	----------

Sumber: Hasil olah data

Pada tabel 11, memperlihatkan nilai *Durbin-Watson* (DW) yaitu 1.120090 dan terdapat di kisaran -2 hingga 2, yang menandakan bahwa masalah autokorelasi tidak terjadi dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Dilakukannya uji heteroskedastisitas agar mampu menentukan model regresi yang digunakan memiliki ketidaksesuaian *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Ketika nilai probabilitas $< \alpha$ (0,05), menandakan masih terdapat masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.242531	0.181050	1.339577	0.1854
LNP KP	-0.007733	0.017301	-0.446960	0.6565
INF	0.002641	0.001527	1.729825	0.0888
LNUM	-0.013856	0.010181	-1.360948	0.1786
RLS	0.004798	0.003184	1.507024	0.1371

Sumber: Hasil olah data

Diketahui pada tabel 10, *probability* setiap variabel *independent* $> 0,05$, yang menandakan tidak adanya masalah heteroskedastisitas.

Teknik Penentuan Model
Uji Chow

Pengujian model ini melakukan perbandingan model terbaik antara CEM dan FEM. Ketika nilai *probability* < alpha (0,05), berarti model estimasi FEM lebih baik dibandingkan model CEM. Selanjutnya ketika nilai probabilitas > alpha (0,05), berarti CEM lebih baik digunakan dalam pengujian.

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	1.443008	(4,56)	0.2319
Cross-section Chi-square	6.376435	4	0.1727

Sumber: Hasil olah data

Dilihat dari tabel 4, nilai *probability* (0,2319) > alpha (0,05). Berarti model terbaik pada Uji *Chow* yakni *Common Effect Model*.

Uji Hausman

Uji model ini melakukan perbandingan model terbaik pada FEM atau REM. Ketika probabilitas < alpha (0,05), berarti model estimasi FEM lebih baik daripada model CEM. Selanjutnya ketika nilai *probability* > alpha (0,05), berarti REM merupakan model terbaik yang digunakan dalam pengujian.

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq.Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	5.772031	4	0.2168

Sumber: Hasil olah data

Dilihat pada tabel 5, nilai *probability* (0.2168) > alpha (0,05), berarti model terbaik pada Uji *Hausman* yakni *Random Effect Model*.

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Pada uji ini, melakukan perbandingan model terbaik diantara CEM atau REM. Ketika *probability* < alpha (0,05), menandakan model estimasi REM lebih baik digunakan dibanding model CEM. Berikutnya ketika nilai *probability* > alpha (0,05), berarti CEM merupakan model terbaik dalam pengujian.

Tabel 7. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided
Breusch-Pagan	0.5904

Sumber: Hasil olah data

Dilihat pada tabel 6, nilai probability Breusch-Pagan (0.5904) > alpha (0,05), berarti terpilih model *Common Effect Model*. Selanjutnya setelah Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier* mampu disimpulkan model terbaik merupakan model CEM karena menjadi model terbaik pada Uji *Chow* dan Uji *Lagrange Multiplier*.

Interpretasi Model

Setelah uji penentuan model, CEM merupakan model terbaik untuk digunakan pada penelitian ini. Pada metode CEM didapat hasil regresi variabel PKP, INF, UM, dan RLS terhadap GR di Provinsi D.I Yogyakarta yang ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: GR
 Method: Panel Least Squares

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.168362	0.313772	-3.723603	0.0004
LNPKP	-0.006685	0.029983	-0.222962	0.8243
INF	-0.002585	0.002646	-0.976938	0.3325
LNUM	0.103230	0.017645	5.850501	0.0000
RLS	0.016888	0.005518	3.060702	0.0033

Sumber: Hasil olah data

Pada tabel diatas, didapatkan persamaan regresi data panel:

$$GR_{it} = -1.16836175979 - 0.00668514899627 LNPKP_{it} - 0.00258483476569 INF_{it} + 0.103229980258 LNUM_{it} + 0.0168876003389 RLS_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana:

- GR_{it} = Gini Rasio daerah i dan tahun t
- LNPKP = Log Natural Pengeluaran Per Kapita daerah i dan tahun t
- INF = Inflasi daerah i dan tahun t
- UM = Log Natural Upah Minimum daerah i dan tahun t
- RLS = Rata Lama Sekolah daerah i dan tahun t
- ε = Error Term
- i = Wilayah (Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta)
- t = Waktu (Tahun 2010 – 2022)

Berdasarkan hasil persamaan diatas menunjukkan:

- a. Nilai konstanta yaitu pada angka -1.16836175979 artinya jika variabel PKP, INF, UM, dan RLS bernilai konstan maka Gini Rasio mempunyai nilai sebesar -1.16836175979.
- b. Nilai koefisien regresi variabel PKP sebesar -0,00668514899627, koefisien bernilai negatif berarti setiap perubahan pengeluaran per kapita sebesar satu satuan mampu menurunkan nilai Gini Rasio sebesar 0,00668514899627 dengan anggapan variabel independen yang lain nilainya tetap.
- c. Nilai koefisien regresi variabel INF adalah -0,00258483476569, koefisien bernilai negatif berarti setiap perubahan inflasi sebesar satu satuan mampu menurunkan nilai

Gini Rasio sebesar 0,00258483476569 dengan anggapan variabel independen yang lain nilainya tetap.

- d. Nilai koefisien regresi variabel UM adalah 0,103229980258, koefisien bernilai positif berarti setiap perubahan upah minimum sebesar satu satuan mampu meningkatkan nilai Gini Rasio sebesar 0,103229980258 dengan anggapan variabel independen yang lain nilainya tetap.
- e. Nilai koefisien regresi variabel RLS adalah 0,0168876003389, koefisien bernilai positif berarti setiap perubahan Rata-Rata Lama Sekolah sebesar satu satuan mampu meningkatkan nilai Gini Rasio sebesar 0,0168876003389 dengan anggapan variabel independen lain nilainya tetap.

Uji Signifikansi

Uji t (Pengujian Secara Parsial)

Dilakukannya uji t atau uji parsial agar mampu mendeteksi pengaruh signifikansi dari setiap variabel *independent* terhadap variabel *dependent* secara individu. Uji ini berlangsung melalui perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel} atau perbandingan *probability* pada tiap t_{hitung} dengan alpha. Ketika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau *probability* < α (0.05), artinya menerima H_0 sehingga menunjukkan variabel *independent* secara signifikan memberikan pengaruh terhadap variabel *dependent* secara parsial. Nilai t_{tabel} diperoleh melalui rumus $=tinv(\alpha;n-k)$ dalam program Microsoft Excel atau bisa juga diperoleh dari tabel dengan nilai $df=n-k$ dengan n merupakan jumlah observasi dan k merupakan jumlah variabel *independent*. Nilai $df=61$ dan signifikansi 0.05, sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 1.999624.

Tabel 9. Hasil Uji t

Dependent Variable: GR
Method: Panel Least Squares

Variable	t-Statistic	Prob.
C	-3.723603	0.0004
LNP KP	-0.222962	0.8243
INF	-0.976938	0.3325
LNUM	5.850501	0.0000
RLS	3.060702	0.0033

Sumber: Hasil olah data

- a. Pengujian terhadap variabel Pengeluaran Per Kapita
 Pengeluaran per kapita mempunyai nilai t_{hitung} (0.222962) < t_{tabel} (1.999624) dan *probability* 0.8243 > alpha 5% (0.8243 > 0.05), kesimpulannya adalah menerima H_0 dan menolak H_1 dimana menandakan variabel pengeluaran per kapita tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.
- b. Pengujian terhadap variabel Inflasi

Inflasi mempunyai nilai $t_{hitung} (0.976938) < t_{tabel} (1.999624)$ dan probability $0.3325 > \alpha 5\% (0.3325 > 0.05)$, kesimpulannya adalah menerima H_0 dan menolak H_2 dimana menandakan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

c. Pengujian terhadap variabel Upah Minimum

Upah minimum mempunyai nilai $t_{hitung} (5.850501) > t_{tabel} (1.999624)$ dengan probability $0.0000 < \alpha 5\% (0.0000 < 0.05)$, kesimpulannya adalah menolak H_0 dan menerima H_3 dimana menandakan variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

d. Pengujian terhadap variabel Rata Lama Sekolah (RLS)

RLS mempunyai nilai $t_{hitung} (3.060702) > t_{tabel} (1.999624)$ dengan probability $0.0033 < \alpha 5\% (0.0033 < 0.05)$, kesimpulannya menolak H_0 dan menerima H_4 dimana menandakan variabel RLS berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Uji F (Pengujian Secara Simultan)

Tujuan pengujian ini adalah menunjukkan pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* secara bersamaan. Uji ini melalui perbandingan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} atau dengan melihat probabilitas secara keseluruhan dengan kriteria keputusan seperti berikut:

1. Menerima H_0 dan menerima H_1 , jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni $F_{\alpha}(k-1, n-k)$ atau $prob < \alpha (0,05)$, menandakan variabel *independent* berpengaruh secara simultan terhadap variabel *dependent*.

2. Menerima H_0 dan menerima H_1 , jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ yakni $F_{\alpha}(k-1, n-k)$ atau $prob > \alpha (0,05)$, menandakan variabel *independent* tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel *dependent*.

Ketika $p\text{-value} < \alpha (0,05)$, artinya variabel berpengaruh signifikan dan sebaliknya. Nilai F_{tabel} dapat dilakukan menggunakan alat bantu *Microsoft Excel* melalui rumus $=FINV(\alpha; k-1; n-k) = FINV(0.05; 4-1; 65-4) = 0.116668889$.

Tabel 10. Hasil Uji F

F-statistic	26.90910
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil olah data

Terlihat pada tabel 13. diatas bahwa nilai $F_{hitung} (26.90910) > F_{tabel} (0.116668889)$ dengan nilai nilai probabilitas atau P-Value = $0.000000 < 0,05$, artinya secara statistik variabel independen yaitu PKP, INF, UM, dan RLS bersamaan secara simultan menunjukkan pengaruh signifikan terhadap GR sebagai variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R-Squared)

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.642083
Adjusted R-squared	0.618221

Sumber: Hasil olah data

Pada tabel diatas, didapati nilai *R-squared* (R^2) sebesar 0,642083 yang menandakan variabel PKP, INF, UM, dan RLS mampu menjelaskan GR sebesar 64,21%, sementara sisanya 35.79% mampu dijelaskan oleh variabel lainnya. Pada nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,618221, menandakan variabel PKP, INF, UM, dan RLS mampu berpengaruh terhadap variabel GR sebesar 61,82%, sementara sisanya 38,18% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Analisis Ekonomi dan Pembahasan

Analisis Pengaruh Pengeluaran Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta

Pengujian yang telah dilakukan menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua. Peningkatan yang terjadi pada Jumlah Penduduk akan menyebabkan peningkatan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan, begitupun sebaliknya. Dengan begitu, hipotesis pertama yang telah ditentukan pada penelitian ini dapat diterima. Hal tersebut dapat dijelaskan oleh kondisi tingginya indeks kedalaman kemiskinan di Papua yang diiringi oleh kenaikan jumlah penduduk di Provinsi Papua, terutama pada tahun 2017 – 2022. Hubungan signifikan positif antara jumlah penduduk dan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua dapat dilihat pada kenaikan jumlah penduduk pada tahun 2019 dan 2022 yang selaras dengan kenaikan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2019 dan 2022.

Hasil penelitian sesuai dengan teori “An Essay on the Principle of Population” oleh Malthus yang mengasumsikan hubungan positif antara jumlah penduduk dan kemiskinan. Pada teori tersebut, Malthus menjelaskan bahwa populasi yang semakin tinggi dikhawatirkan akan berdampak negatif pada meningkatnya biaya hidup yang secara langsung akan berakibat kepada kondisi kemiskinan. Tentu peningkatan jumlah penduduk yang dimaksud adalah peningkatan jumlah penduduk yang tidak diiringi oleh kualitas SDM yang mumpuni. Keberlanjutan dan peningkatan jumlah penduduk memang merupakan faktor pendukung yang penting dalam mendukung suatu permintaan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan apabila hal tersebut justru dapat menyebabkan permasalahan kemiskinan yang lebih serius apabila terus terjadi penambahan yang tinggi.

Hasil penelitian juga didukung oleh penelitian Puspita Candra Bella dan Syamsul Huda pada tahun 2023 yang juga menjelaskan bahwa jumlah penduduk menunjukkan pengaruh yang signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. Penelitian ini menyebutkan bahwa peningkatan jumlah penduduk di DI Yogyakarta yang tidak diimbangi oleh kualitas penduduk dapat menghambat proses pembangunan ekonomi sehingga menjadi penyebab meningkatnya kemiskinan di DI Yogyakarta.

Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian, pengeluaran per kapita tidak memperlihatkan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta sehingga hipotesis satu ditolak, dimana besar atau kecilnya pengeluaran per kapita tidak berpengaruh terhadap turun maupun naiknya ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta. Terjadi ketidaksesuaian pada sampel di 5 Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta dimana tahun 2018-2019 pengeluaran per kapita meningkat bersamaan dengan turunnya ketimpangan pendapatan di tahun 2019. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan sampel 4 Kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2011-2012 dimana meningkatnya pengeluaran per kapita bersamaan dengan naiknya ketimpangan pendapatan yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pengeluaran per kapita terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian (Sri Indriyani S Dai, Syarwani Canon, dan Devi Oktaviani Bauty, 2023) tidak searah dengan penelitian ini karena hasilnya menyatakan pengeluaran per kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di KBI dan KTI. Penelitian (Nurul Laili Mauliddah dan Asyidatur Rosmaniar, 2019) sejalan dengan penelitian ini karena menyatakan pengeluaran per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

Terjadi ketidaksesuaian hasil penelitian pada teori konsumsi Keynes yang menyebutkan pengeluaran konsumsi rumah tangga tergantung dari pendapatan yang diterima, sehingga ketika pendapatan naik maka konsumsi akan meningkat pula (Twinki & Widiyanti, 2023). Kenaikan pengeluaran per kapita menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat juga mengalami kenaikan (Indrayanti, 2020). Keynes berpendapat bahwa tindakan konsumsi oleh individu dalam suatu perekonomian dapat menjadi sumber pendapatan bagi individu lain dalam perekonomian yang sama. Artinya bahwa ketika seseorang mengeluarkan uangnya akan mendorong peningkatan untuk pendapatan masyarakat lain. Perputaran tersebut berlanjut dan menghasilkan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan (A. Wijayanti & Ngadiman, 2023).

Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian, inflasi tidak menunjukkan pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dua ditolak, dimana besar atau kecilnya tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap turun atau naiknya ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta. Penelitian ini memperoleh hasil yang tidak sejalan oleh pernyataan Cardozo (1993) yang menyebutkan inflasi berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Namun, pernyataan tersebut tergantung keadaan inflasi di negara itu sendiri dimana apabila keadaan awal inflasi berada pada tingkat rendah akan menyebabkan hubungan negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara apabila keadaan awal inflasi sudah tinggi mampu menunjukkan pengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Tidak stabilnya inflasi dan besarnya tingkat inflasi mampu memberikan dampak buruk terhadap perekonomian karena dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Inflasi di Provinsi D.I Yogyakarta cukup stabil dan tergolong ringan dikarenakan berada tingkat inflasi di bawah 10%, sehingga seharusnya tingkat inflasi menunjukkan pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini memperoleh hasil yang tidak sejalan dengan inflasi di tahun 2022 yang meningkat pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta sebesar 4,2%. Kenaikan tingkat inflasi tersebut bersamaan dengan penurunan ketimpangan pendapatan pada 3 Kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta yaitu Kabupaten Bantul turun sebesar 0,031%, Kabupaten Gunungkidul turun sebesar 0,007% dan Kabupaten Sleman turun sebesar 0,007%.

Analisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta

Berdasarkan hasil regresi, upah minimum menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta, berarti naiknya upah minimum mampu meningkatkan ketimpangan pendapatan dan hipotesis ketiga diterima. Hasil penelitian selaras dengan semua sampel di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2016 – 2017, dimana upah minimum meningkat pada Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp 104.730, Kabupaten Bantul naik sebesar Rp 107.060, Kabupaten Gunungkidul naik sebesar Rp 101.950, Kabupaten Sleman naik sebesar Rp 110.385 dan Kota Yogyakarta naik sebesar Rp 119.800.

Hasil penelitian tidak selaras dengan penelitian (Razi Rahman dan Dewi Zaini Putri, 2021) yang menunjukkan hasil pada upah minimum menunjukkan hubungan negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Penelitian (Istikharoh, Whinarko Juli Prijanto dan Rian Destiningsih, 2020) mendukung hasil penelitian ini karena menunjukkan hasil upah minimum hubungan positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta.

Analisis Pengaruh RLS Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta

Berdasarkan hasil yang didapatkan, RLS memperlihatkan pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta. Sehingga naiknya tingkat RLS akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan hipotesis keempat diterima. Hasil penelitian sejalan dengan tahun 2015, RLS di 5 Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta meningkat dimana pada Kabupaten Kulonprogo naik sebesar 0,2 tahun, Kabupaten Bantul naik sebesar 0,34 tahun, Kabupaten Gunungkidul naik sebesar 0,01, Kabupaten Sleman meningkat 0,34 tahun dan Kota Yogyakarta meningkat 0,02.

Kenaikan RLS pada tahun 2015 di semua Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta tersebut bersamaan pada naiknya ketimpangan pendapatan dimana pada Kabupaten Bantul meningkat sebesar 0,055, Kabupaten Gunungkidul naik sebesar 0,023, Kabupaten Sleman naik sebesar 0,05 dan Kota Yogyakarta naik sebesar 0,05. Penelitian (Dian Windu Utami dan Amirullah Setya Hardi, 2019) mendukung hasil penelitian ini dimana RLS mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

Ketidaksesuaian penelitian ini pada penelitian (Yolanda Sari, Ahmad Soleh, dan Wiken Wafiaza, 2021) dimana RLS berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi, sehingga kenaikan RLS mampu mengurangi ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menghasilkan keputusan yang tidak sesuai pada teori *human capital* dari Gery S. Becker yang menyatakan tingkat pendidikan seseorang yang semakin tinggi mampu membuat upah yang diterima juga lebih tinggi.

5. SIMPULAN

Didasari dari hasil penelitian, berdasarkan analisis variabel *independent* meliputi pengeluaran per kapita, inflasi, upah minimum dan rata-rata lama sekolah terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta periode 2010-2022, diperoleh kesimpulan :

1. Pengeluaran per kapita tidak memperlihatkan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien negatif, berarti pengeluaran per kapita belum memberikan pengaruh nyata terhadap persoalan ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta. Terjadi ketidaksesuaian penelitian dengan teori konsumsi Keynes, dikarenakan ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta selama tahun 2010 hingga 2022 terus meningkat cukup tinggi. Tak hanya itu, perekonomian di Provinsi D.I Yogyakarta sangat bergantung pada sektor pariwisata dan pendidikan. Namun, adanya pandemi Covid-19 berdampak terhadap mahasiswa yang melaksanakan pendidikan di Provinsi D.I Yogyakarta memutuskan untuk kembali pada daerah asalnya sehingga meningkatnya pengeluaran per kapita tidak menunjukkan pengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.
2. Inflasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien negatif, berarti kenaikan inflasi belum memberikan pengaruh nyata terhadap ketimpangan pendapatan yang disebabkan inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta bergerak fluktuatif sejak tahun 2010 – 2022. Tingkat inflasi yang menyebabkan harga-harga barang cenderung naik tidak berpengaruh terhadap daya beli

masyarakat bagi yang memiliki modal dan penghasilan tinggi. Kemudian ketika bahan-bahan pokok mengalami kenaikan, masyarakat yang berpendapatan rendah tidak selalu terkena dampak karena penduduk di Provinsi D.I Yogyakarta banyak yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor tersebut menjadi peringkat ke-2 dengan tenaga kerja terbesar di Provinsi D.I Yogyakarta setelah sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda Motor (BPS Provinsi D.I Yogyakarta, 2022).

3. Upah minimum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien positif, sehingga kenaikan upah minimum dapat berakibat pada kenaikan ketimpangan pendapatan. Kondisi ini disebabkan adanya perbedaan pendapatan atau upah minimum pada setiap wilayah di Provinsi D.I Yogyakarta berdampak terhadap ketimpangan pendapatan dikarenakan tidak meratanya pendapatan yang dihasilkan, sehingga dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan.
4. Rata-rata lama sekolah memperlihatkan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan memiliki koefisien positif, artinya kenaikan RLS dapat berakibat terhadap pada ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta turut meningkat. Kondisi tersebut dikarenakan provinsi ini menjadi tempat untuk melanjutkan pendidikan baik jenjang menengah maupun perguruan tinggi oleh masyarakat di berbagai daerah, terutama pada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang melimpah akan sekolah menengah dan perguruan tinggi ternama di Indonesia. Banyak para pelajar yang berasal dari luar daerah menempuh pendidikan di Provinsi D.I Yogyakarta, namun setelah selesai menempuh pendidikan tersebut beberapa orang kembali ke wilayah asal atau berpindah ke kota lain untuk bekerja. Selain itu, tingkat pendidikan yang diukur berdasarkan RLS di Provinsi D.I Yogyakarta memiliki tingkatan berbeda di setiap Kabupaten/Kota. Sehingga perbedaan setiap daerah tersebut menyebabkan kualitas sumber daya yang tersedia berbeda-beda dan menimbulkan permasalahan ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfadhillah, F. H., Windari, N. N., & Affan Widyarif, M. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan Diprovinsi D.I.Yogyakarta (Periode2005-2021). *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 8, 1.
- Alin, N. F., Heriberta, H., & Umiyati, E. (2019). Fakta Empiris Kurva U-Terbalik Kuznets Mengenai Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 9–16. <https://doi.org/10.22437/Paradigma.V14i1.6788>
- Andina, T. S., Nikensari, S. I., & Nurjanah, S. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan , Kesehatan , Dan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 7, 101–111.
- Dongoran, F. R., Sulfina, S. D., Syah, S. A., & Siahaan, T. (2023). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (Jemb)*, 1(2), 198–207. <https://doi.org/10.47233/Jemb.V1i2.671>
- Duarsa, F. A., & Wijaya, R. S. (2023). *Equilibria Pendidikan : Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*. 8(2).

- Fakhroni, I., & Futaqi, F. A. (2022). The Effect Of Return On Equity, Earning Per Share And Price Earning Ratio On Stock Prices. *Proceeding Of Annual Internationalconference On Islamic Economics (Aicie)*, 4(01), 57. <https://doi.org/10.33062/Ajb.V4i01.360>
- Febriyani, A., & Anis, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(4), 9. <https://doi.org/10.24036/Jkep.V3i4.12375>
- Hadi, A. (2019). Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Terhadap Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. *Media Trend*, 14(2), 148–153. <https://doi.org/10.21107/Mediatrend.V14i2.4504>
- Hariani, E. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015. *The International Journal Of Applied Business Tijab*, 3(1), 1–11.
- Huda, N., & Indahsari, K. (2021). Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 2(1), 55–66. <https://doi.org/10.21107/Bep.V2i1.13849>
- Imron, I. (2019). Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada Cv. Meubele Berkah Tangerang. *Indonesian Journal On Software Engineering (Ijse)*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.31294/Ijse.V5i1.5861>
- Intani, M. M. (2019). Pemodelan Regresi Panel Dengan Pendekatan Model Fixed Effect. *Universitas Brawijaya*, 1(1).
- Kusuma, D. S. D., Sarfiah, S. N., & Septiani, Y. (2019). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Inflasi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. *Dinamic: Directory Journal Of Economic*, 1(3), 282–293.
- Nizar, F., & Arif, M. (2023). Pengaruh Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita, Pendapatan Asli Daerah, Investasi, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Nusa Tenggara Barat Tahun 2012-2021. 4(1), 48–58.
- Nurain, H., & Juliannisa, I. A. (2022). Analisis Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan Pada Lima Provinsi Tertimpang Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 18(1), 53. <https://doi.org/10.30742/Equilibrium.V18i1.1960>
- Park, K. H. (2017). *Asian Development Bank Institute*. 732, 75–75. https://doi.org/10.1007/978-1-349-67278-3_116
- Prabowo, D. W. (2022). Mewujudkan Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Berkelanjutan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (Jsei)*, 4(1), 1–7.
- Qarina. (2020). Pengaruh Upah Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pdb Perkapita Di Indonesia. *Study Of Scientific And Behavioral Management*, 1(2), 56–62.

- Rachmawatie, D. (2021). Apakah Pendapatan Asli Daerah (Pad) Mendorong Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Yogyakarta? *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 831–838. <https://doi.org/10.22437/jpe.V16i4.15720>
- Rahman, R., & Putri, D. Z. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi Di Pulau Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(3), 37. <https://doi.org/10.24036/jkep.V3i3.12368>
- Rando, S., Rotinsulu, D., & Rorong, I. (2021). Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Vol.22 No.1 (2021) Analisis Faktor-Faktor Penentu. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(1), 66–83.
- Riyanto, A., Canon, S., & Santoso, I. R. (2022). Factors Affecting Income Distribution In Sulawesi. *Jambura Equilibrium Journal*, 10(1), 1–52. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Romi, S. (2021). Studi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu Timur. *Icor: Journal Of Regional ...*, 1–108.
- S. Dai, S. I., Canon, S., & Bauty, D. O. (2023). Analisis Pengaruh Rls, Pengeluaran Perkapita, Uhh, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kbi Dan Kti. *Jesya*, 6(1), 535–544. <https://doi.org/10.36778/jesya.V6i1.950>
- Shinetiara, T., & Roza, M. (2023). *Ecosains : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia*. 12, 25–32.
- Warapsari, E. B., Hidayat, W., & Rochminarni, A. (2020). Analisis Pengaruh Inflasi, Pdrb, Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Jie*, 4(4), 747–761. <https://doi.org/10.22219/jie.V4i4.11389>
- Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 92–100. <https://doi.org/10.20885/jkek.Vol1.Iss1.Art9>